

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A.Oka Mahendra. 2006. Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, hlm. 27
- Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988), hlm. 508.
- B.N. Marbun, DPRD Pertumbuhan, Masalah, & Masa Depan (Edisi Revisi), (Jakarta : Erlangga, 1994), hlm. 88.
- Dadang Solihin, *Peran Tenaga Ahli DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Publik Guna Mendukung Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi*, (Jakarta: Modul Dialog Rektor dengan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Merauke, 2016), hlm 8.
- Hans kelsen, *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusamedia, 2006), hlm. 276.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm 37.
- John M. Echols. 1997. Dictionary of Law. Jakarta: Gramedia. hlm. 353.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm 10.
- Miriam Budiardjo, 1995, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 151.
- Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (Jakarta: Sofimedia, 2011), hlm 169.

- Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan dari *L'Esprit des Lois*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 187.
- Ni'matul Huda, *Hukum dan Pemerintahan*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 83.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.
- Pipin Syarifin dan Dedah jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm 66.
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 79
- Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm 252.
- Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 125.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 66.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.205
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 8. 34Soehino, *Ilmu Negara*, op.cit.), hlm. 159.
- Tjahjo Kumolo dan Tim, *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2017), hlm 17.

Jurnal

- Bambang Iriana Djajaatmadja.2006.“Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan PerundangUndangan diDaerah”.Jurnal Legislasi Indonesia Vol3 No1.Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 34
- Bandiyah dkk, *Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)*, Jurnal FISIP Universitas Udayana, (Bali: Universitas Udayana, 2014), hlm 1.
- Monica Galuh et al., “DIPONEGORO LAW REVIEW Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Undang- Tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan” 5 (2016): 1–17.
- Nanda Pratama Sukoco, *Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*, (UNAIR Surabaya: Jurnal Administrasi Publik Th.II Nomor 8, Juli-Desember 2012).
- Nuri Eviriyanti, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi)*, Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1, (Jakarta: PKK-FH UNDIP, 2011), hlm 58.
- Ratnia Sholihah, *Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal TAPIS Volume 13 Nomor 02 Juli-Desember 2017 UIN Raden Intan Lampung, hlm 116.
- Thomy Loda, Ronny Gosa, and Josef Kairupan, “Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di DPRD Halmahera Barat,” Eksekutif,Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 3, no. 3 (2019): 3.
- W. Jati, *‘Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi’*, Jurnal Konstitusi.

Karya Tulis Ilmiah

- Aries Djaenuri, “Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah,” *Repository.Ut.Ac.Id* 3 (2015): 1–46, <http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>.

Perundang – undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 150 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan DPRD kota Semarang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DPRD kota Semarang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD kota Semarang.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/12 Tahun 2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2021

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/31 15Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2022

Internet

https://dprd.semarangkota.go.id/page/kewajiban_hak diakses pada tanggal 3 Januari 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang#Ekonomi diakses pada tanggal 10 Januari 2023

https://dprd.semarangkota.go.id/page/alat_pimpinan Diakses pada tanggal 11 Januari 2023

<https://media.neliti.com/media/publications/19008-ID-pelaksanaan-fungsi-legislasi-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kota-semarang-dalam.pdf> Diakses pada tanggal 13 Januari 2023

Wawancara

Kadar Lusman, SE, MM, ketua DPRD kota Semarang, wawancara, di Semarang tanggal 30 Desember 2022

Nur Maulita, SH, bagian persidangan dan perundang – undangan DPRD kota Semarang, wawancara, di Semarang tanggal 30 Desember 2022